

NASKAH PUBLIKASI

EFEKTIVITAS PROGRAM KELOMPOK USAHA BERSAMA (KUBE) SEJAHTERA DALAM UPAYA PENGENTASAN KEMISKINAN DI DESA CATURARJO, KECAMATAN SLEMAN, KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2016-2017

Oleh:

Luthfia Karimah
20150520031

Telah disetujui dan disahkan sebagai naskah publikasi sesuai kaidah
penulisan karya ilmiah

Dosen Pembimbing



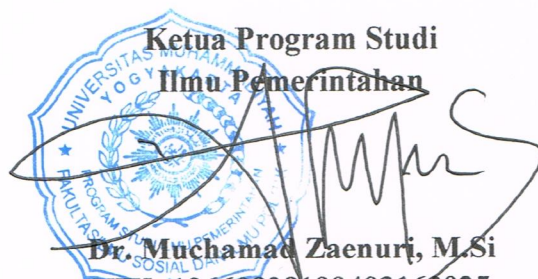
Isnaini Muallidin, S.IP., MPA
NIK: 19710225201204163130

Mengetahui,



Dekan Fakultas Ilmu Sosial
dan Ilmu Politik

Dr. Titin Purwaningsih, S.IP., M.Si
NIK: 19690822199603163038



Ketua Program Studi
Ilmu Pemerintahan

Dr. Muchamad Zaenuri, M.Si
NIK: 19660828199403163025

EFEKTIVITAS PROGRAM KELOMPOK USAHA BERSAMA (KUBE) SEJAHTERA DALAM UPAYA PENGENTASAN KEMISKINAN DI DESA CATURHARJO, KECAMATAN SLEMAN, KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2016-2017

Luthfia Karimah¹, Isnaini Muallidin²
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
luthfiakarimah31@gmail.com

ABSTRACT

Joint business group (KUBE) is one of the programs that exist in the Social Ministry RI that especially in the Directorate General empowerment of poor community groups by providing venture capital to manage the productive Economic Efforts (UEP). The implementation of a joint venture Group (KUBE) Prosperous in the village of Caturharjo, in 2016-2017 has managed to get the award, but the execution of the joint venture Group (KUBE) Prosperous yet can overcome the problems of poverty that existed in the village Caturharjo of the year 2016-2017 which is proven by poverty in the village of Caturharjo who still occupies the first position from the other villages in the Sub-District of Sleman after applied program KUBE in 2015. The formulation of the problem in this research is how the effectiveness of the Program Group joint venture (KUBE) Prosper In poverty reduction Efforts in the village of Caturharjo, district of Sleman, Regency of Sleman Years 2016-2017, and what the driving factors and a barrier in terms of formation, implementation, management, KUBE in village Caturharjo, district of Sleman, Regency of Sleman. The type of research used in this study is the type of qualitative research dekriptif. Qualitative research aims to know the event that happened for the subject researches thoroughly. The location selected in this research is the village of Caturharjo, district of Sleman, Regency of Sleman.

Keywords: Poverty, Poverty Alleviation, Program KUBE.

ABSTRAK

Kelompok usaha bersama adalah salah satu program-program yang ada di Kementerian Sosial RI yang khususnya dalam Direktorat Jenderal pemberdayaan masyarakat miskin kelompok dengan memberikan modal usaha untuk mengelola usaha ekonomi produktif (UEP). Pelaksanaan patungan sejahtera kelompok (KUBE) di desa Caturharjo, di 2016-2017 telah berhasil mendapatkan penghargaan, tetapi pelaksanaan usaha patungan sejahtera kelompok (KUBE) belum bisa mengatasi masalah kemiskinan yang ada di desa Caturharjo tahun 2016-2017 yang terbukti dengan kemiskinan di desa Caturharjo yang masih menempati posisi pertama dari desa-desa lain di Kabupaten Sleman setelah diterapkan program KUBE pada tahun 2015. Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana efektivitas Program kelompok usaha bersama (KUBE) Prosper di pengurangan kemiskinan upaya di desa Caturharjo, Kabupaten Sleman, Kabupaten Sleman tahun 2016-2017, dan apa mengemudi faktor dan penghalang dalam pembentukan, implementasi, manajemen, KUBE di desa Caturharjo, Kabupaten Sleman, Kabupaten Sleman. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis dekriptif riset kualitatif. Penelitian kualitatif bertujuan untuk mengetahui peristiwa yang terjadi untuk subjek penelitian secara menyeluruh. Lokasi yang dipilih dalam penelitian ini adalah desa Caturharjo, Kabupaten Sleman, Kabupaten Sleman.

Kata kunci: Kemiskinan, Pengentasan Kemiskinan, Program KUBE.

I. Pendahuluan

Masalah kemiskinan adalah masalah utama yang menjadi perhatian, baik di dalam pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah. Kemiskinan merupakan masalah yang terus-menerus terjadi dan merupakan suatu permasalahan yang berkepanjangan. Kemiskinan menyebabkan banyak warga yang tidak bisa mendapatkan pendidikan tinggi, kesehatan, sulitnya warga untuk mendapatkan pelayanan yang baik, sulitnya untuk memenuhi kebutuhan dasar, seperti pemenuhan kebutuhan sandang, pangan dan papan. Permasalahan kemiskinan mempunyai hubungan yang erat dengan jumlah pendapatan, pengangguran, pendidikan, kesehatan, letak geografis, kondisi lingkungan, akses barang dan jasa, budaya, kesehatan dan politik (Huraerah, 2013)

Data jumlah kemiskinan yang diperoleh dari BPS, menunjukkan angka penduduk miskin yang ada di Indonesia sejak tahun 1999 hingga tahun 2018 mengalami penurunan angka kemiskinan di Indonesia. Pada tahun 2011, angka penduduk miskin adalah 30,01. Tahun 2012, adalah 28,71 juta jiwa. Tahun 2013, adalah 28,17 juta jiwa. Tahun 2014, adalah 27,73 juta jiwa. Tahun 2015, jumlah penduduk miskin jumlahnya 28,51 juta jiwa. Tahun 2016, jumlah penduduk miskin adalah 27,76 juta jiwa. Tahun 2017, jumlah angka kemiskinannya 27,77 juta jiwa. Selanjutnya tahun 2018 jumlah penduduk miskin di Indonesia adalah (BPS,2018).

Setelah pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010, tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dilanjutkan dengan Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, yang merupakan bentuk pembaharuan dari Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan. Pada peraturan tersebut tercantum perintah untuk membentuk Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) yang ada di pusat anggotanya terdiri dari: pemerintah, kalangan di bidang usaha, masyarakat, dan aktor pemilik kepentingan lainnya (Tulung, 2011).

Beberapa lembaga atau kementerian mempunyai program yang berfokus pada penurunan angka jumlah penduduk miskin. Salahsatu kementerian tersebut adalah Kementerian Sosial yang mempunyai focus utama dalam menurunkan angka masyarakat miskin melalui program pemberdayaan masyarakat dan penanganan fakir miskin (P2FM). Kebijakan program pengentasan telah dimaksudkan ke dalam beberapa program teknis, contohnya Kelompok Usaha Bersama (KUBE) (Lubis, 2014). Kelompok Usaha Bersama Fakir Miskin (KUBE-FM) adalah kumpulan keluarga yang masuk ke dalam golongan miskin dan mempunyai kesepakatan untuk membentuk sebuah kegiatan yang berkembang dan saling berhubungan untuk mengembangkan produktivitas anggota, menumbuhkan kerjasama yang serta dan

harmonis untuk menjadi tempat mengembangkan kegiatan usaha bersama (Depsos RI,2005). Sasaran Kelompok Usaha Bersama (KUBE) adalah setiap provinsi/kabupaten yang memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi. Salahsatu yang menjadi sasaran dilaksanakannya program pengentasan kemiskinan adalah Provinsi DIY. Program KUBE dilaksanakan di Provinsi DIY dengan cara pendekatan yang melalui tahap menciptakan kesadaran kelompok untuk membangun kemandirian masyarakat miskin, kebersamaan sosial ekonomi produktif dengan maksud untuk memberikan nilai tambah perekonomian dan sikap mandiri melalui pembangunan ekonomi dan sosial yang berkelanjutan (Dinsos Prov. DIY,2010).

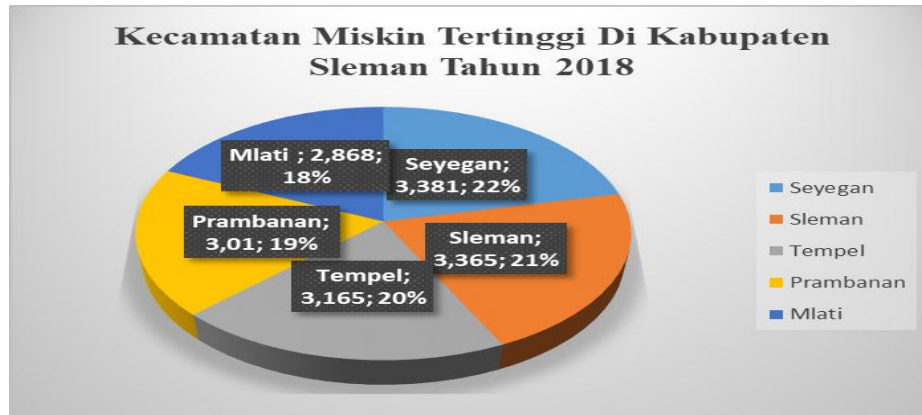
Tabel 1.1
Jumlah Penduduk Miskin DIY Menurut Kabupaten/Kota

Kabupaten/Kota	2012	2013	2014	2015	2016
D.I. Yogyakarta	562.10	541.90	532.59	485.56	494.94
Kulonprogo	92.40	86.50	84.67	84.67	84.17
Bantul	158.80	156.60	153.49	153.49	142.76
Gunungkidul	156.50	152.40	148.39	148.39	139.15
Sleman	116.80	110.80	110.44	110.44	84.34
Yogyakarta	37.60	35.60	36.60	36.60	32.06

Sumber : BPS DIY, 2016

KUBE adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DIY dalam mengentaskan kemiskinan dalam bentuk kegiatan pemberdayaan masyarakat miskin yang digerakkan oleh Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta yang berdasarkan atas salahsatu program dari Kementerian Sosial untuk menanggulangi kemiskinan yang dilaksanakan di kabupaten/kota yang mempunyai focus dan kewenangan untuk menetapkan kabupaten yang akan menerima bantuan dan jumlah KUBE yang akan menerima bantuan kemudian Kementerian Sosial akan memberikan bantuan untuk mengembangkan usaha melalui dana APBN. Penanggulangan kemiskinan melalui program pemberdayaan KUBE bagi masyarakat fakir miskin oleh Kementerian Sosial RI melalui Dinas Sosial Provinsi DIY juga dilaksanakan pada dinas sosial yang berada di tingkat kabupaten/kota, termasuk Dinas Sosial Kabupaten Sleman. Program pengentasan kemiskinan KUBE yang dilaksanakan di Kabupaten Sleman, dijalankan di setiap kecamatan-kecamatan yang ada sesuai dengan pengarahannya dan pengawasan Dinas Sosial Kabupaten Sleman. Kegiatan-kegiatan KUBE dilaksanakan di kecamatan-kecamatan yang memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi di Kabupaten Sleman diantaranya adalah Kecamatan Sayegan, Kecamatan Mlati, Kecamatan Sleman, Kecamatan Tempel. Beberapa kecamatan

tersebut menerapkan Program KUBE, di Kabupaten Sleman Program KUBE tersebut dilaksanakan dan diberi nama dengan KUBE Sejahtera.



Gambar 1.1
Kecamatan Miskin Tertinggi di Kabupaten Sleman Tahun 2017
Sumber: Forum Kabupaten RKPDIY 2017

Salahsatu kecamatan yang menjadi sasaran pelaksanaan KUBE di Kabupaten Sleman adalah Kecamatan Sleman. Kecamatan Sleman menempati posisi ke-2 dengan presentase kemiskinan 21% sebagai salahsatu Kecamatan yang ada di Kabupaten Sleman yang memiliki tingkat kemiskinan tertinggi pada tahun 2017. Kecamatan Sleman menjadi sasaran pelaksanaan program pengentasan kemiskinan yang dijalankan oleh Dinas Sosial yaitu Kelompok Usaha Bersama (KUBE). Salahsatu dari lima desa yang ada di Kecamatan Sleman yang menerapkan program KUBE dalam upaya pengentasan kemiskinan yang tinggi adalah Desa Caturharjo.

Tabel 1.2
Jumlah KK Miskin, Dan Presentase Per Desa Di Kecamatan Sleman Tahun 2016

NO	Kecamatan/Desa	Jumlah KK	KK Miskin	%KK Miskin Terhadap Jumlah KK
	Sleman	23.116	3.665	15,43%
1	Caturharjo	5.078	1.116	22,27%
2	Triharjo	5.990	863	13,99%
3	Tridadi	4.836	482	9,68%
4	Pandowoharjo	3.978	596	14,78%
5	Trimulyo	3.234	558	16,73%

Sumber : BPS Sleman, 2016.

Target dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan keterampilan masyarakat adalah sebagai upaya untuk menciptakan kemandirian dalam mendirikan usaha, dan meningkatkan pendapatan rumah tangga, serta membangun keterampilan dan keahlian masyarakat miskin. Kelompok Usaha Bersama (KUBE) juga sebagai upaya mengurangi angka kemiskinan hingga ke tingkat desa, salahsatu desa yang menjadi sasaran Program KUBE adalah Desa Caturharjo, yang terletak di Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman. Salahsatu Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Sejahtera di Desa Caturharjo berdasarkan beberapa media pemberitaan seperti TribunJogja, Antaranews Jogja dan web (<http://www.slemankab.go.id>) yang ada di Dusun Nambongan, Desa Caturharjo, Kabupaten Sleman memperoleh juara 1 dalam "Evaluasi KUBE dan Pendamping Berprestasi tahun 2017". Pada tahun sebelumnya, yaitu pada tahun 2016, KUBE Sejahtera juga mendapatkan prestasi di tingkat Kabupaten Sleman dan maju ke tingkat DIY pada tahun 2017 dan kemudian memperoleh juara I (Nugroho, 2017). Tetapi, pada kenyataannya, meskipun salahsatu KUBE tersebut berhasil, dan telah diterapkan Program KUBE sejak tahun 2015 di Desa Caturharjo, angka kemiskinan di Desa Caturharjo pada tahun 2016-2017 masih memiliki angka kemiskinan yang tinggi, bahkan, dibandingkan dengan tahun 2016, angka kemiskinan di tahun 2017 lebih tinggi jumlahnya padahal telah diterapkan Program KUBE sebagai upaya pengentasan kemiskinan di Desa Caturharjo, setelah Program KUBE diterapkan di Desa Caturharjo, angka kamiskinan disana tidak mengalami penurunan, Desa Caturharjo masih menjadi desa dengan angka kemiskinan tertinggi di Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman.

Berdasarkan pada latar belakang diatas, penulis tertarik untuk meneliti dan mengambil judul skripsi "Efektivitas Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Sejahtera Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan di Desa Caturharjo, Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman Tahun 2016-2017", dan mengetahui faktor pendorong dan penghambat dalam hal pembentukan, pelaksanaan, pengelolaan, KUBE di Desa Caturharjo, Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman.

II. Tinjauan Pustaka

1. Efektivitas

a. Pengertian Efektivitas

Menurut Sedarmayanti (2001) menjelaskan pengertian efektivitas, disini yang dimaksud efektivitas adalah suatu tolak ukur yang menggambarkan seberapa jauh tujuan yang bisa dicapai (Juli Panglima Saragih, 2014).

Menurut Effendy (2003) efektivitas yaitu komunikasi yang kegiatannya untuk menuju tujuan yang hendak dicapai berdasarkan ketepatan biaya yang dikeluarkan, jumlah waktu dan anggota yang ditetapkan (Mutiarin & Khadafi, 2017)

Siagian (dalam Edi S:2012) menjelaskan pengertian efektivitas. Efektivitas merupakan penggunaan sumber daya, fasilitas sarana dan prasarana yang sudah diatur kuantitatifnya untuk menetapkan keberhasilan beberapa barang atas jasa aktivitasnya yang digerakannya. Efektivitas adalah fokus keberhasilan atau tidaknya, tepat sasaran atau tidak. Apabila kebijakan atau program dekat dengan target yang dituju, artinya semakin tinggi efektivitasnya (Suryani, 2015)

Menurut Hayaningrat (1995) efektivitas adalah ukuran dalam keberhasilan mencapai target atau sasaran yang telah dibuat sebelumnya. Hadayaningrat menjelaskan ukuran efektivitas dapat dilihat dari target yang berupa waktu, kualitas dan kuantitas yang telah tercapai. Semakin besar presentase target yang tercapai, maka semakin tinggi efektivitasnya pula (Suryani, 2015).

b. Kriteria Ukuran Efektivitas

Gibson menjelaskan beberapa kriteria untuk mengukur tingkat efektivitas, diantaranya adalah: (Panggulu, 2013)

- 1) Produksi, ialah keahlian lembaga atau organisasi dalam menghasilkan beberapa keluaran sesuai pada keinginan yang ada.
- 2) Efisiensi, ialah membandingkan diantara masukan dan keluaran
- 3) Kepuasan, ialah tolak ukur dalam memperlihatkan tingkat keberhasilan organisasi untuk mencapai kebutuhan masyarakat.
- 4) Keunggulan, ialah tingkat kemampuan dalam perubahan internal dan eksternal
- 5) Pengembangan, ialah tolak ukur keahlian organisasi untuk meningkatkan tanggungjawab untuk menjalankan keinginan masyarakat

c. Indikator-Indikator Efektivitas

Menurut Sutrisno (2007) indicator-indikator efektivitas diantaranya adalah: (Afrinaldi, 2017)

1. Pemahaman Program

Pada indicator ini artinya seberapa jauh masyarakat telah paham mengenai program. Suatu program dapat dikatakan berhasil dapat dilihat dari sering dilakukannya kegiatan sosialisasi atau pembinaan oleh kelompok yang bertanggungjawab pada pengentasan kemiskinan. Sosialisasi yang dilakukan maka akan menimbulkan suatu pengetahuan yang dapat dipahami ke masyarakat. Memberikan materi pada saat sosialisasi penting, agar masyarakat bisa paham tentang materi yang disampaikan. Pemahaman program, diantaranya adalah:

a.) Sumber informasi anggota mengenai program (sosialisasi)

Pengenalan program sangat penting sebagai tempat sumber informasi. Pemerintah memberikan materi dalam sosialisasi dan menjelaskan manfaat yang akan diterima setelah mendapatkan sosialisasi. Komunikasi adalah sesuatu yang sangat penting yang akan menentukan berhasilnya tujuan yang dicapai pada suatu program. Suatu program akan efektif pelaksanaannya apabila tercipta kontak hubungan antara pihak-pihak yang berkepentingan dapat berlangsung secara baik.

b.) Tingkat pemahaman dan rasa tertarik sesudah memperoleh informasi mengenai program

Program dalam upaya pengentasan kemiskinan masyarakat miskin melalui bantuan modal untuk mengembangkan usaha tidak hanya memberikan materi dan bantuan, namun juga menciptakan pemahaman dan rasa tertarik masyarakat dalam mengikuti program penanggulangan kemiskinan.

c.) Pengetahuan anggota tentang maksud program

Hal penting pada saat bimbingan dan sosialisasi yaitu dapat paham mengenai program dengan menyeluruh, maka dengan begitu program bantuan tersebut tepat sasaran, sesuai arahan, maka dengan hal ini diperlukan adanya pemahaman tentang program baik dalam bentuk materi ataupun praktek, agar masyarakat dapat mendapatkan bantuan sesuai dengan keterampilannya dan pemerintah dapat mencapai tujuan program yang hendak dituju yaitu pengentasan kemiskinan.

2. Tepat Sasaran

Maksud dari tepat sasaran adalah masyarakat yang telah mendapatkan pengetahuan dan sosialisasi adalah sasaran yang tepat yaitu masyarakat miskin. Program yang dibentuk pemerintah memang seharusnya mempunyai sasaran yang tepat, karena dalam sebuah program, apabila sesuai dengan sasaran yang akan dituju, maka program tersebut dapat dikatakan berhasil. Sasaran pada sebuah program harus benar-benar sesuai dengan kenyataan yang ada di masyarakat, termasuk program pengentasan kemiskinan yang dibuat oleh pemerintah, harus mempunyai sasaran yang tepat untuk memberantas kemiskinan. Tepat sasaran diantaranya adalah:

a.) Sasaran utama adalah masyarakat miskin

Melakukan observasi lapangan, kemudian validasi dan verifikasi data penduduk miskin adalah langkah yang dilakukan pemerintah dengan cara menentukan bagi siapa saja yang berhak menerima bantuan program, dan masyarakat miskin yang menjadi prioritas pemerintah untuk mencapai kesejahteraan perekonomian dalam kehidupannya.

b.) Masyarakat yang tidak mempunyai keterampilan

Pemerintah dalam menyusun program memfokuskan pada masyarakat miskin dan masyarakat yang tidak mempunyai keterampilan yang belum dapat terpenuhi kehidupannya sehari-hari, sehingga perlu adanya keahlian dan keterampilan agar sehingga masyarakat lebih produktif dan kehidupannya bisa lebih sejahtera.

3. Tepat Waktu

Tepat waktu disini dapat dilihat berdasarkan penggunaan waktu dan program pelatihan keterampilan yang ditunjukkan kepada masyarakat sudah sesuai apa yang telah disepakati. Tepat waktu disini diantaranya adalah:

a.) Sejak kapan memperoleh bantuan program

Sejak tahun berapa daerah atau wilayah sasaran mulai menerima bantuan atau sejak kapan mulai masuk program pengentasan kemiskinan di daerah tersebut.

b.) Kuantitas waktu memperoleh pertemuan anggota program

Pelaksanaan pertemuan rutin anggota dengan pendamping program yang dilaksanakan pada waktu tertentu untuk dilakukan evaluasi pelaksanaan dan berjalannya program tersebut, kemudian kegiatan monev yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

4. Tercapainya tujuan

Tercapainya tujuan dapat kita lihat dari suatu tujuan dicapai yang telah ditetapkan melalui program pengentasan kemiskinan. Tercapainya tujuan diantaranya adalah

a.) Mengembangkan pengetahuan masyarakat

Meningkatkan pengetahuan saat kegiatan sosialisasi dan bimbingan pasti akan berpengaruh positif pada pengetahuan yang diterima masyarakat.

b.) Peningkatan kemandirian dan keterampilan

Mengembangkan dan meningkatkan kemandirian anggota kelompok yang ada dalam mengembangkan usaha yang dijalankan sehingga mereka bisa mandiri dan meningkatkan keterampilan mereka.

5. Perubahan dalam bentuk nyata

Kita dapat mengetahui suatu kegiatan berdampak baik dan dapat melakukan perubahan yang nyata bagi masyarakat dari program yang dilaksanakan. Perubahan dalam bentuk nyata diantaranya adalah :

a.) Melihat dorongan dalam diri (motivasi), kesiapan, kreativitas dan pengenalan dengan lingkungan serta rasa percaya diri masyarakat sebelum ikut dalam kegiatan program.

b.) Mengamati kreativitas, dorongan dalam diri (motivasi), kesiapan, dan pengenalan dengan lingkungan dan rasa percaya diri sesudah ikut dalam kegiatan program

2. **Kemiskinan**

a. **Pengertian Kemiskinan**

Kemiskinan menurut World Bank (2010) ialah suatu bentuk kurangnya kesejahteraan, selain itu memiliki keterkaitan dengan dimensi lainnya yaitu pendapatan yang rendah dan ketidakmampuannya untuk memperoleh barang dasar dan tingkat kesehatan yang rendah dan pendidikan, kurangnya kemampuan untuk memenuhi air bersih dan sanitasi (www.worldbank.org).

Kuncoro (2003) menjelaskan pengertian dari kemiskinan sebagai ketidakberdayaan untuk memenuhi standar hidup yang paling dasar. Kebutuhan dasar yang dimaksud disini adalah, kebutuhan berupa sandang, pangan, papan, pendidikan dan kesehatan (Dwirandra, 2016)

Menurut Suparlan (2000) menjelaskan kemiskinan adalah keadaan dimana kehidupannya dalam kondisi kekurangan, kurang disini dalam arti bentuk benda dan harta yang terjadi pada seseorang atau sekelompok orang-orang yang menempati suatu daerah yang semuanya dalam keadaan miskin ataupun modalnya yang kurang kondisi dimana serba kekurangan, baik itu benda dan harta yang dialami seseorang atau sekelompok orang yang tinggal pada wilayah serba miskin maupun kurangnya modal, selain itu kurangnya jumlah keuangan yang dimilikinya, pengetahuan, penguatan sosial, politik, hukum ataupun akses sarana pelayanan umum dan ketersediaan kesempatan dalam bekerja (Pratama, 2014).

b. **Faktor Penyebab Kemiskinan**

Penyebab-penyebab kemiskinan menurut Bappenas (2011) diantaranya adalah : (Prawoto, 2009)

1. Kurangnya kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pangan
2. Rendahnya pelayanan kesehatan dan kualitas pendidikan
3. Rendahnya kesempatan untuk memperoleh pekerjaan
4. Sulitnya mendapatkan akses air bersih dan sanitasi air
5. Kepemilikan dan penguasaan tanah yang tidak jelas
6. Keadaan lingkungan hidup dan sumber daya alam yang buruk
7. Jaminan akan rasa aman yang kurang dan Partisipasi yang rendah
8. Angka beban kependudukan yang tinggi
9. Tata kelola pemerintahan yang buruk

c. **Jenis-jenis kemiskinan**

Noor (dalam Murdiansyah:2014) membagi kemiskinan menjadi empat, diantaranya adalah:

1. Kemiskinan absolute

Kemiskinan absolute adalah kondisi dimana penghasilan kasar yang diperoleh setiap bulan tidak dapat untuk memenuhi kebutuhan minimum

2. Kemiskinan relatif

Kemiskinan relatif bisa dilihat dengan membandingkan antara satu kebutuhan dengan tingkat pendapatan lainnya

3. Kemiskinan structural

Keadaan dimana golongan orang tinggal di daerah kemiskinan, dan tidak ada kesempatan mereka untuk lepas dari kemiskinan

4. Kemiskinan kultural

Kemiskinan disebabkan oleh faktor budaya, budaya disini adalah budaya miskin (Murdiansyah, 2014)

d. Prinsip-Prinsip Pengentasan Kemiskinan :

Pengentasan kemiskinan dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip diantaranya adalah : (Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2017).

1. Pemberdayaan
2. Partisipatif
3. Sinergi
4. Terukur
5. Transparan dan akuntabel
6. Berkelanjutan

e. Asas-asas pengentasan kemiskinan

Kemiskinan yang tinggi di Indonesia sudah seharusnya diatasi, agar jumlah kemiskinan yang tinggi tersebut dapat menurun, untuk menjalankan kebijakan atau program yang dikeluarkan pemerintah dalam pengentasan kemiskinan, maka, program tersebut harus berjalan berdasarkan asas-asas yang berlaku, agar program tersebut dapat berjalan dengan baik dan memberikan dampak yang optimal, asas-asas tersebut adalah sebagai berikut: (Suliswanto, 2010)

1. Objektif
2. Transparan
3. Keadilan
- 4. Akuntabel**

f. Faktor-Faktor Keberhasilan Program Pengentasan Kemiskinan

Menurut Chambers, et al (dalam Muktasam:2011) menjelaskan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan berhasilnya program kemiskinan diantaranya adalah: (Chambers, 1996).

1. Pendekatan yang menyatu dan menyeluruh
2. Bersifat pengembangan sumber daya manusia

g. Faktor-Faktor Kegagalan Program Kemiskinan

Menurut Sumarto (2010) Faktor-faktor yang menyebabkan kemiskinan masih sulit untuk diatasi, diantaranya adalah:

1. Keadaan masyarakat yang tidak berpartisipasi pada kegiatan pertemuan rutin
2. Faktor-faktor pendukung produksi yang belum mencukupi
3. Tingkat pendidikan di pedesaan yang rendah
4. Perencanaan pembangunan yang dilaksanakan pemerintah kurang sesuai dengan keahlian masyarakat untuk ikut serta sehingga masyarakat tidak mampu untuk mengikuti kegiatan tersebut (Miradj & Sumarno, 2014)

3. Kelompok Usaha Bersama (KUBE)

a. Pengertian KUBE

Departemen Sosial RI (2005) menjelaskan pengertian KUBE, Kelompok Usaha Bersama Fakir Miskin (KUBE-FM) adalah kumpulan keluarga yang masuk ke dalam golongan miskin dan mempunyai kesepakatan untuk membentuk sebuah kegiatan yang berkembang dan saling berhubungan untuk mengembangkan produktivitas anggota, menumbuhkan kerjasama yang serta dan harmonis untuk menjadi tempat mengembangkan kegiatan usaha bersama (Ariyani, Fauzi, Juanda, & Beik, 2015).

Kelompok Usaha Bersama (KUBE) merupakan Program Kesejahteraan Sosial (PROKESOS) yang dikeluarkan oleh Pemerintah RI dari tahun 1990. Pembentukan program KUBE memiliki keinginan agar para penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang terdapat di Indonesia dapat mengalami penurunan jumlahnya. KUBE dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial-ekonomi masyarakat miskin. Kelompok Usaha Bersama (KUBE) juga dapat menciptakan hubungan yang erat, mengembangkan kreativitas, menumbuhkan rasa setia kawan dan kebersamaan, dan menumbuhkan rasa mandiri diantara sesama anggota KUBE. Kemudian, menciptakan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ikut serta dalam pembangunan perekonomian di Indonesia. Target dari kebijakan program pengentasan kemiskinan KUBE tahun 2014-2015 diantaranya sebagai berikut :

1. Menciptakan kualitas SDM baik dari aparatur maupun kesejahteraan sosial masyarakat sejumlah 10% tahun
2. Penurunan jumlah penduduk miskin dan masalah kesejahteraan yang sering terjadi di masyarakat
3. Jumlah dan keterampilan masyarakat dalam bentuk kelembagaan maupun perorangan pada hal menangani masalah kesejahteraan bisa meningkat

Kelompok Usaha Bersama (KUBE) adalah salahsatu program pemberdayaan masyarakat yang telah dikenal sebagai program yang dicetuskan oleh Kementerian Sosial RI, terutama dalam hal pemberdayaan masyarakat miskin. Menurut data Kementerian Sosial (www.kemsos.go.id) pada tahun 2010 target pelaksanaan KUBE di 33 provinsi yang ada di Indonesia berjumlah 132.363. Kelompok Usaha Bersama (KUBE) sendiri telah berjalan sejak tahun 1983, dan sampai saat ini masih dilaksanakan di provinsi-provinsi dan kabupaten-kabupaten yang ada di Indonesia (Kemensos,2010)

Sehingga Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dirasa sebagai salahsatu program pengentasan kemiskinan yang dibuat oleh pemerintah yang dirasa mampu dalam mengurangi angka kamiskinan yang ada di Indonesia, dengan menerapkan sistem pelatihan pemberdayaan dan keterampilan bagi warga miskin. Munculnya Kelompok Usaha Bersama (KUBE) ialah untuk mendorong masyarakat miskin agar melangkah lebih maju dalam hal ekonomi dan sosial. Menciptakan hubungan dan kerjasama di dalam kelompok, meningkatkan ketersediaan daerah dalam bidang sosial ekonomi.

a. Dasar Hukum

Dasar Hukum Pembentukan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Indonesia adalah :

- 1.) Undang Undang Dasar 1945, pasal 27 (ayat 2), pasal 28 huruf H ayat 3, pasal 33, pasal 34 ayat 1 dan ayat 2
- 2.) Undang Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
- 3.) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 tahun 1981 tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi fakir miskin
- 4.) Peraturan Pemerintah Republik Indenesia Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian tugas Pemeritahan antara pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten.
- 5.) Peraturan Pemerintah Republik Indenesia Nomor 7 tahun 2008 tentang Dekosentrasi dan Tugas Pembantuan
- 6.) Peraturan Kementerian Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008, tentang Pedoman Pengeloan Dana Dekosentrasi dan Tugas Pembantuan
- 7.) Peraturan Kementerian Sosial Nomor 129/HUK/2008, tentang standar Pelayanan Minimal Pelayanan Kesejahteraan Sosial
- 8.) Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 84/HUK/1997 tentang Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial Bagi Keluarga Fakir miskin
- 10) Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 19/HUK/1998 tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi Fakir Miskin yang diselenggarakan oleh masyarakat

- 11) Keputusan Bersama Menteri koperasi, pengusaha kecil dan Menengah dan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 05/ SKB/M/V/1999 dan Nomor 45/ HUK/1999 Pembinaan dan Pengembangan Kelompok Usaha Bersama melalui pembentukan Koperasi
- 12) Keputusan bersama Menteri Sosial dan Menteri Agama Nomor 293/2002 dan Nomor 40/PEGHUK/2002, tentang Pendayagunaan Dana Zakat untuk Pemberdayaan Fakir Miskin.

b. Indikator-indikator keberhasilan bantuan KUBE

Menurut Kemensos (1994) Indikator-indikator keberhasilan bantuan KUBE diantaranya adalah :

- 1) Mengembangkan usaha ekonomi berbasis kelompok
- 2) Keadaan kesejahteraan sosial dalam Keluarga Binaan Sosial (KBS) secara menyeluruh
- 3) Iuran Kesejahteraan Sosial (IKS) atau Sumbangan Sosial Wajib (SSW) dan perkembangan gotong royong
- 4) Melaksanakan jaminan kesejahteraan sosial berdasarkan pada organisasi sosial
- 5) Mengembangkan tabungan dan tabanas
- 6) Terdapat atau tidaknya keikutsertaan dalam kegiatan karang taruna
- 7) Pengaruh proyek bantuan kesejahteraan sosial dalam masyarakat (Yasin, 2015).

c. Syarat Pembentukan dan Keanggotaan KUBE

Syarat untuk membentuk dan menjadi anggota KUBE menurut Kementerian Sosial dalam website (www.kemosos.go.id) adalah:

1. Tujuan utama pembentukkan KUBE untuk masyarakat miskin lebih mandiri dan produktif
2. Pada setiap KUBE anggota yang ada di dalamnya berjumlah 10 KK
3. Anggota yang tergabung dalam KUBE adalah yang berusia 15-55 tahun dan sudah menikah
4. Mempunyai kegiatan sosial dan Unit Ekonomi Produktif (UEP)
5. Mempunyai pembukuan maupun catatan keuangan
6. Direkomendasikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota melalui Dinas Sosial Kabupaten/Kota dan direkomendasikan oleh Dinas/Instansi Sosial Provinsi.

f. Tujuan dibentuknya KUBE

Tujuan dikeluarkannya Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) diantaranya adalah: (Kemensos,2010).

1. Meningkatkan keterampilan dalam berusaha bagi anggota KUBE dalam kelompok
2. Meningkatkan penghasilan
3. Mengembangkan usaha
4. Meningkatkan kesadaran sosial antara anggota KUBE dengan masyarakat lainnya.

III. Pembahasan

1. Sumber informasi anggota mengenai program

Masyarakat memperoleh informasi tentang adanya Program KUBE yang masuk ke Desa Caturharjo melalui sosialisasi dan kegiatan BIMTEK yang diselenggarakan di Balai Desa. Kegiatan menyampaikan informasi terkait dengan program yang akan dijalankan melibatkan kepala dukuh yang ada di Desa Caturharjo, karena kepala dukuh mempunyai peran sebagai penghubung antara pemerintah desa dengan masyarakat. Kepala dukuh melakukan komunikasi dengan masyarakatnya terkait dengan rencana program yang akan dijalankan oleh pemerintah desa, komunikasi atau pemberitahuan melalui kepala dukuh melalui pertemuan-pertemuan dengan warga.

- a. Sumber informasi anggota mengenai program

Pemberian informasi mengenai KUBE dimulai sebelum kepala dukuh mendata keluarga miskin calon penerima bantuan. Suatu program akan efektif pelaksanaannya apabila tercipta kontak hubungan atau komunikasi antara pihak-pihak yang berkepentingan karena akan menentukan berhasilnya tujuan yang dicapai pada suatu program. Pihak disini adalah pengelola pelaksanaan program dengan masyarakat miskin sebagai sasaran program dapat berlangsung secara baik. Sosialisasi dilakukan oleh pemerintah desa pada rapat koordinasi yang dihadiri oleh kepala dukuh Desa Caturharjo dilakukan melalui pertemuan desa yang dihadiri oleh kepala-kepala dukuh dan masyarakat miskin yang telah didata oleh kepala dukuh. Selanjutnya, Pemerintah melaksanakan sosialisasi Program KUBE dengan masyarakat yang telah ditetapkan sebagai anggota KUBE setelah verifikasi dan validasi yang dilakukan oleh Dinas Sosial Provinsi, Dinas Sosial Kabupaten dan Pendamping KUBE.

Sumber informasi pertama yang diperoleh oleh anggota KUBE mengenai Program KUBE adalah melalui kepala dukuh. Kepala dukuh mempunyai tugas sebagai pelaksana pembangunan dan pemerintahan desa. Kelompok Usaha Bersama (KUBE) sebagai program yang pemberdayaan masuk ke Desa Caturharjo, kepala dukuh juga mempunyai tugas menyampaikan informasi yang diberikan dari pemerintah desa untuk kemudian disampaikan ke masyarakat. Program yang telah dikeluarkan oleh pemerintah sangat penting untuk dilakukan sosialisasi untuk kemudian di informasikan kepada sasaran yang dituju hal ini dilakukan agar masyarakat benar-benar mengerti dan paham mengenai program tersebut. Sosialisasi yang dilakukan secara optimal dan secara menyeluruh, akan membuat program

tersebut terhindar dari penyalahgunaan program. Meningkatnya pemahaman mengenai program oleh kelompok sasaran, akan mengurangi tingkat kesalahpahaman informasi dalam pelaksanaan dan penerapan program tersebut, mengerti manfaat adanya program tersebut serta dapat meningkatkan kesadaran dan minat masyarakat miskin untuk ikut serta dalam program tersebut, sehingga angka kemiskinan yang tinggi dapat menurun.

Kendala atau permasalahan yang terjadi pada saat pelaksanaan kegiatan sosialisasi umum diantaranya adalah persepsi masyarakat miskin anggota KUBE yang mempunyai pemikiran bahwa bantuan yang diperoleh adalah bantuan hibah murni, padahal telah dijelaskan bahwa bantuan bersifat pemberdayaan fakir miskin dengan syarat dan aturan tertentu, termasuk di dalamnya anggota KUBE mempunyai kewajiban untuk mengembangkan bantuan yang diterima. Kendala kedua adalah, adanya persepsi bahwa bantuan sifatnya perorangan, sehingga bila bantuan sudah diterima akan dikelola sendiri-sendiri oleh anggota kelompok bukan dikelola secara bersama-sama dalam kelompok. Kemudian, kendala selanjutnya pada pelaksanaannya dengan bantuan yang bentuknya berupa modal usaha, pada umumnya anggota KUBE masih awam dengan model system bank, termasuk di dalam melaksanakan pembelian secara bersamaan sehingga harga barang menjadi lebih mahal.

- b. Tingkat pemahaman dan rasa tertarik sesudah memperoleh informasi mengenai program

Minat dan motivasi dari masyarakat untuk ikut dan masuk ke dalam kelompok sebagai program pengentasan kemiskinan yang dibuat oleh pemerintah sangat besar. Pengembangan minat dan daya tarik untuk mengikuti program dapat terbentuk pada saat kegiatan sosialisasi. Tidak bisa dipungkiri bahwa bantuan dana modal untuk mengembangkan usaha yang didapatkan oleh kelompok menjadi salahsatu alasan mengapa mereka tergabung dalam Program KUBE.

- c. Pengetahuan anggota tentang maksud (tujuan) program

Pelaksanaan kegiatan sosialisasi dilaksanakan agar masyarakat dapat paham mengenai Program KUBE secara menyeluruh, sehingga tujuan yang ingin dituju dengan diterapkannya Program KUBE dapat terlaksana dengan baik dan memberikan dampak positif bagi anggota KUBE. Pada pelaksanaan Program KUBE diperlukan adanya pemahaman program baik dalam bentuk materi ataupun praktek secara menyeluruh, agar masyarakat dapat melaksanakan program sesuai dengan aturan atau ketentuan pelaksanaan Program KUBE. Sebuah kebijakan atau program akan berjalan efektif, apabila masyarakat paham akan program tersebut dan mendapat tanggapan atau respon positif dari kelompok sasaran. Proses dalam membangun dan mengembangkan pemahaman Program KUBE dilaksanakan melalui dua kegiatan, yaitu: Sosialisasi dan Bimbingan Teknis (BIMTEK).

Setelah dilakukan verifikasi dan validasi calon penerima bantuan KUBE menjadi penerima bantuan dilakukan sosialisasi umum yang didalamnya menyampaikan materi tentang Program KUBE, diberikan juga sebuah motivasi dari Dinas Sosial. Pengembangan pemahaman masyarakat mengenai Program KUBE mempunyai keterkaitan yang erat dengan proses sosialisasi yang dilakukan. Sebab, pengetahuan masyarakat tentang program dimulai saat adanya sosialisasi. Materi yang disampaikan dengan kelompok adalah tujuan KUBE, konsep program, syarat kelompok sasaran, hak dan kewajiban penerima, jangka waktu pelaksanaan program, jumlah bantuan dana modal untuk mengembangkan usaha yang diterima, bagaimana mengajukan proposal usaha ke dinas, hingga alur pencairan dana yang telah dijelaskan pada saat BIMTEK yang langsung dijelaskan oleh Bank BRI Cabang Sleman pada saat menghadiri kegiatan BIMTEK.

2. Tepat Sasaran

- a. Sasaran utama adalah masyarakat miskin

Tabel 3.2

Angka Kemiskinan Setiap Dukuh Di Desa Caturharjo Tahun 2017

No	Padukuhan	Jumlah Penduduk	Jumlah Jiwa Miskin	Jumlah KK Miskin	Jumlah Jiwa Rentan Miskin	Jumlah KK Rentan Miskin
1	Kemloko	645	173	54	213	72
2	Ngangkruk	944	83	26	313	96
3	Ganjuran	769	642	133	196	67
4	Medari Gede	859	477	81	138	52
5	Jetis	1.067	228	63	255	85
6	Medari Cilik	627	168	55	159	51
7	Mrisen	641	143	43	152	52
8	Sidorejo	676	231	63	231	69
9	Sanggrahan	921	278	90	220	71
10	Nambongan	987	275	84	299	93
11	Mangunan	985	293	85	284	94
12	Ngemplak	1166	417	125	371	125
13	Kendangan	440	65	20	214	68

14	Dalangan	273	74	26	129	41
15	Kumprit	345	52	18	96	41
16	Malang	664	62	22	194	59
17	Bojen	529	148	42	155	60
18	Kleben	756	239	60	215	68
19	Keceme	829	233	72	187	63
20	Ngaglik	673	350	103	167	51
Jumlah		14.796	4.631	1.265	4.190	1.378

Sumber : Caturharjo, 2017

Kriteria penerima bantuan Program KUBE berdasarkan kriteria dari indikator-indikator Bappenas. Penerima bantuan mendapatkan bantuan setelah Dinas Sosial Provinsi DIY dan Dinas Sosial Kabupaten Sleman melakukan verifikasi dan validasi pada nama calon penerima bantuan dengan datang langsung ke lokasi calon penerima bantuan. Program KUBE yang telah diterapkan di Desa Caturharjo sudah tepat sasaran, yaitu masyarakat miskin. Pemberian bantuan modal untuk mengembangkan usaha disesuaikan dengan minat, keinginan, keterampilan yang dimiliki dan potensi yang ada pada daerah tersebut. Bantuan diberikan agar keluarga miskin dapat terbebas dari kemiskinan, dapat mengembangkan usaha sehingga mereka dapat meningkatkan pendapatan keluarga mereka, menciptakan kemandirian, menciptakan kesejahteraan sehingga angka kemiskinan dapat menurun. Pemberdayaan masyarakat miskin melalui Program KUBE dilakukan dengan dilakukan pelatihan keterampilan, dengan tujuan mengembangkan kemampuan praktis, sesuai dengan minat dan keterampilan anggota KUBE yang disesuaikan dengan potensi yang ada pada daerah tersebut.

Melalui pelatihan tersebut, rasa percaya diri anggota KUBE untuk mengembangkan usaha dan mencapai kesejahteraan hidup akan muncul. Kurangnya kesempatan yang dimiliki oleh anggota KUBE untuk menentukan jenis usaha sesuai dengan keinginan dan kemampuan mereka menyebabkan Program KUBE tidak dapat berjalan dengan efektif, hal itu terlihat dari meningkatnya angka kemiskinan di Desa Caturharjo tahun 2017 dibandingkan dengan tahun 2016, dan banyaknya jumlah KUBE yang gagal di Desa Caturharjo. Sasaran dari Program KUBE sudah tepat yaitu masyarakat miskin, tetapi terdapat masalah atau kesalahan dalam Program KUBE itu sendiri, yaitu mengenai masalah penentuan jenis usaha program yang tidak sesuai dengan potensi daerah dan minat, kemampuan dari anggota. Program KUBE yang seharusnya bersifat *Bottom-Up* berbanding terbalik dengan kenyataan bahwa program tersebut bersifat *Top-Down*. Masyarakat seharusnya tidak ditempatkan sebagai obyek pembangunan, tetapi sebagai subjek pembangunan dan mereka berhak dan bebas menentukan jenis usaha yang mereka

inginkan sesuai dengan konsep *Bottom-Up*. Tetapi, Program KUBE di Desa Caturharjo memiliki jenis usaha yang seragam di setiap dusun, tidak sesuai dengan apa yang mereka butuhkan, masyarakat tidak diberikan ruang untuk menyampaikan gagasan dalam pembangunan untuk mengentaskan kemiskinan pada Program KUBE yang dilaksanakan di Desa Caturharjo.

b. Masyarakat yang tidak mempunyai keterampilan

Target sasaran Program KUBE di Desa Caturharjo bukan berdasarkan keahlian atau keterampilan, tetapi berdasarkan data keluarga miskin di setiap dukuhnya yang kemudian tergabung dalam kelompok sebagai anggota Program KUBE. Penyuluhan, pembinaan dan pelatihan dalam mengembangkan usaha ekonomi dirasakan sangat penting untuk mengembangkan usaha, agar bisa meningkatkan hasil produksi dan meningkatkan nilai ekonomi yang diperoleh. Masyarakat desa perlu adanya keterampilan dalam beternak, baik itu ternak kambing maupun sapi yang bisa didapatkan dari kegiatan pembinaan dan penyuluhan cara beternak yang baik. Hal tersebut untuk meminimalisir usaha kelompok KUBE yang berjalan di bidang peternakan gagal.

3. Tepat Waktu

a. Sejak kapan memperoleh bantuan program

Berdasarkan hasil wawancara, dapat diketahui bahwa Kelompok Usaha Bersama (KUBE) pertama kali diterapkan di Provinsi DIY adalah tahun 2004, sedangkan di Kabupaten Sleman adalah tahun 2006. Awal mula KUBE masuk di Kecamatan Sleman adalah tahun 2007. Pada kurun waktu 2010-2013 di Kecamatan Sleman, Program KUBE sempat tidak ada atau sempat berhenti. Namun, pada tahun 2015 mulai berjalan kembali Program KUBE di setiap desa yang ada di Kecamatan Sleman, dan mulai muncul dan terbentuk kelompok usaha lagi. Pada tahun 2015 Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) mulai masuk di Desa Caturharjo, Kecamatan Sleman.

b. Kuantitas waktu pertemuan

Pendamping KUBE yang telah disahkan, baik pendamping dari tingkat desa hingga kecamatan yang telah mendapatkan diklat dari Dinas Sosial Provinsi DIY mempunyai kewajiban untuk mendampingi masing-masing kelompok pendampingan yang ada di wilayahnya. Satu orang pendamping mendampingi 5-10 kelompok usaha. Setiap bulan antara pendamping dan kelompok usaha wajib ada pertemuan rutin masing-masing kelompok yang telah disepakati bersama waktu pelaksanaan pertemuan rutin setiap bulannya. Untuk dilakukan. Kegiatan tersebut dilakukan karena selain untuk menjalin kerjasama dan menjalin hubungan yang harmonis diantara anggota kelompok juga sebagai sarana evaluasi program. Evaluasi dalam kegiatan pertemuan dilakukan untuk mengetahui apakah dalam berjalannya pelaksanaan program tersebut berhasil atau tidak, dapat berjalan

dengan baik atau tidak, bagaimana perkembangan atau kemajuan dari KUBE dan mengetahui permasalahan atau kendala-kendala apa saja yang terjadi dalam pelaksanaan program tersebut, sehingga dapat mengambil solusi atau jalan keluar dari permasalahan yang terjadi tersebut. Secara periodik selama kurun waktu 3 bulan sekali, pendamping wajib memberikan laporan pendampingan. Laporan diserahkan bersamaan dengan perkumpulan pendamping di Dinas Sosial Provinsi DIY. Pendamping melaporkan laporan selama triwulan berjalannya bantuan program mengenai kendala-kendala, keberlangsungan kelompok yang didampinginya, aspek sosial, ekonomi dan kelembagaan dari kelompok yang di dampinginya.

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) yang dilakukan oleh Dinas Sosial, dilaksanakan pada 3 bulan setelah pemberian bantuan, hingga 12 bulan saat berjalannya Program KUBE. Monev I dilaksanakan pada Juli-Desember 2015. Pertemuan rutin setiap bulan merupakan kegiatan evaluasi dilakukan diantara pendamping dengan KUBE yang didampinginya. Setelah tiga bulan, setiap pendamping melaporkan laporan pendamping pada saat rapat koordinasi yang dilaksanakan di Aula Dinas Sosial Provinsi dan dihadiri oleh pendamping KUBE se-Kabupaten Sleman. Pelaksanaan rapat koordinasi dilakukan setiap triwulan (3 bulan) sekali. Pendamping KUBE yang datang pada saat rapat koordinasi menyampaikan laporan pengadministrasian ke Dinsos Provinsi DIY terkait dengan perkembangan kelompok yang mereka dampingi. Kemudian, Dinas Sosial akan turun ke lapangan melakukan monev lagi periode ke-2 untuk mengetahui kondisi yang terjadi pada kelompok usaha tersebut. Pada kegiatan Monev II dilaksanakan pada periode Januari-Desember 2016. Dinas Sosial Provinsi dan Dinas Sosial Kabupaten Sleman terjun langsung ke lokasi KUBE. Kegiatan Monev II untuk mengetahui perkembangan KUBE dilihat berdasarkan tiga aspek, yaitu aspek ekonomi, aspek sosial dan aspek kelembagaan.

Pada awal pembentukan, pertemuan anggota KUBE untuk melakukan evaluasi pelaksanaan program dilakukan secara rutin dan terjadwal pada setiap bulannya. Pada pertemuan tersebut, dilakukan pembahasan mengenai persoalan atau kendala-kendala yang terjadi, kemudian dicari solusi untuk mengatasi persoalan tersebut, kemudian membahas tentang laporan keuangan masuk dan keluar, serta IKS (Iuran Kesejahteraan Sosial).

Tabel 3.4
Jadwal Pertemuan Setiap KUBE Desa Caturharjo

NO	HARI/TANGGAL	JAM	TEMPAT	ACARA
1	TANGGAL 28	20.00 WIB	KUBE 001 SIDOREJO	REMBUG KUBE
2	TANGGAL 03	20.00 WIB	KUBE 005 NAMBONGAN	REMBUG KUBE
3	MINGGU PON	10.00 WIB	KUBE 007 NGEMPLAK	REMBUG KUBE
4	MALAM MINGGU KLIWON	20.00 WIB	KUBE 009 KENDANGAN	REMBUG KUBE
5	TANGGAL 25	20.00 WIB	KUBE 010 DALANGAN	REMBUG KUBE

Sumber : Desa Caturharjo, 2016

Permasalahan internal sebuah kelompok secara tidak langsung menyebabkan hubungan yang tidak harmonis dan menghambat pelaksanaan pertemuan rutin. Perwujudan tujuan sosial dalam KUBE untuk menjalin sikap kerjasama, hubungan yang harmonis diantara anggotanya serta indikator keberhasilan KUBE dalam bidang sosial dapat dikatakan tidak berjalan.

4. Tercapainya Tujuan

a. Mengembangkan Pengetahuan Masyarakat

Program akan berjalan baik jika mendapat tanggapan atau respon positif dari kelompok sasaran. Masyarakat yang hadir dan antusias datang ke dalam sebuah sosialisasi, dan menyimak dengan seksama materi yang dijelaskan akan menciptakan sebuah pemahaman terkait materi yang dijelaskan oleh informan sosialisasi. Pengembangan pengetahuan masyarakat mempunyai keterkaitan yang erat dengan proses sosialisasi yang dilakukan. Sebab, pengetahuan masyarakat tentang program dimulai saat adanya sosialisasi. Pada saat kegiatan sosialisasi diberikan penjelasan mengenai tujuan KUBE, kriteria atau syarat kelompok sasaran, hak dan kewajiban penerima, jumlah bantuan dana modal untuk mengembangkan usaha yang diterima, bagaimana mengajukan proposal usaha ke dinas, hingga alur pencairan dana hingga dana bisa di transfer ke rekening bank kelompok sasaran. Materi yang disampaikan berdasarkan pada keadaan dan apa yang diperlukan oleh kelompok sehingga selanjutnya mereka akan paham dalam pelaksanaan program.

b. Peningkatan kemandirian dan keterampilan

Pemberdayaan masyarakat di bidang peternakan tidak mudah dilakukan terlebih mengenai permasalahan hewan ternak. Kendala dalam usaha peternakan kambing diantaranya adalah usia dan perkembangbiakkan kambing yang butuh waktu yang lebih lama

menyebabkan perputaran modal untuk beternak kambing menjadi lambat. Membutuhkan waktu yang lama untuk menunggu hasil atau keuntungan dari perkembangbiakkan ternak kambing. Salahsatu persoalan yang menyebabkan kemandirian belum tercipta pada KUBE Sejahtera Desa Caturharjo adalah mayoritas anggota KUBE tidak memiliki modal pengembangan usaha lagi setelah bantuan yang diturunkan oleh Dinas Sosial Provinsi yang berasal dari dana dekonsentrasi. Sehingga, mereka harus mencari modal sendiri untuk mengembangkan usaha, baik itu berasal dari bantuan lunak Dinas Sosial Kabupaten Sleman, Bantuan Pemberdayaan dari pemerintah desa, organisasi atau pengusaha, ataupun berasal dari IKS (Iuran Kesejahteraan Sosial). Beberapa kelompok yang sudah tidak lagi mengadakan pertemuan rutin akan kesulitan untuk mengembangkan usaha dan sulit menciptakan kemandirian karena pada setiap pertemuan rutin, akan ada IKS untuk menunjang kemajuan KUBE sebagai modal pengembangan KUBE dan sebagai salahsatu modal untuk mengatasi masalah dari KUBE.

5. Perubahan Dalam Bentuk Nyata

- a. Melihat dorongan dalam diri (motivasi), kesiapan, kreativitas serta rasa percaya diri masyarakat sebelum ikut dalam kegiatan program.

Pada tahap perencanaan kegiatan pemberdayaan yang merupakan tahap awal yang didalamnya ada kegiatan memotivasi anggota KUBE. Pemberian motivasi dilakukan agar anggota mempunyai semangat untuk menggali potensi dan mengembangkan kemampuan yang dimiliki. Tetapi, pemberian bantuan dalam bentuk modal (uang) menjadi salahsatu alasan mereka ingin mengikuti program ini, dan motivasi mereka adalah memperoleh bantuan uang untuk usaha. Pemberian motivasi pada pelaksanaan sosialisasi serta pada penyampaian materi program dilakukan, memotivasi para calon anggota penerima bantuan KUBE untuk semangat mengembangkan usaha yang akan mereka jalankan sehingga mereka juga mempunyai rasa kepercayaan diri dalam mengembangkan usaha.

- b. Mengamati dorongan dalam diri (motivasi), kesiapan, kreativitas serta rasa percaya diri sesudah ikut dalam kegiatan program.

Pemberian bantuan secara tunai untuk mengembangkan usaha menyebabkan mereka ketergantungan dalam jangka panjang. Peningkatan pendapatan jumlahnya tidak signifikan dan belum mampu meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan mereka menyebabkan masyarakat mulai hilang dorongan dalam diri dan hilangnya rasa kepercayaan diri untuk mengembangkan usaha yang mereka jalankan, terlebih kerugian yang mereka dapatkan untuk merawat ternak kambing mereka ketika terserang virus dan penyakit sehingga menyebabkan mereka mulai enggan untuk tetap ikut dan aktif dalam kegiatan Program KUBE salahsatunya adalah pertemuan rutin anggota KUBE. Seiring berjalannya waktu beberapa

anggota mulai kehilangan dorongan dalam diri mereka untuk mengurus ternak, sehingga dilimpahkan tanggungjawabnya ke anggota lain, mereka tidak ada dorongan atau minat dalam diri mereka untuk melaksanakan pertemuan lagi. Tujuan Program KUBE untuk menciptakan kemandirian untuk mengembangkan usaha bagi anggotanya tidak dapat terlaksana.

B. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Keberhasilan KUBE

1. Faktor-Faktor Pendukung Keberhasilan Program

- a. Pendekatan yang menyatu dan menyeluruh
- b. Bersifat Pengembangan Sumber Daya Manusia

2. Faktor Penghambat Keberhasilan Program

- a. Keadaan masyarakat yang tidak berpartisipasi pada kegiatan pertemuan rutin
- b. Faktor-faktor pendukung produksi yang belum mencukupi
- c. Tingkat pendidikan di pedesaan yang rendah
- d. Perencanaan pemerintah tidak sesuai dengan keadaan masyarakat

4. Kesimpulan Dan Saran

A. KESIMPULAN

1.) Program KUBE di Desa Caturharjo telah berjalan sejak tahun 2015, namun pada tahun 2016 hingga 2017, angka kemiskinan di Desa Caturharjo masih menempati posisi pertama sebagai desa dengan angka kemiskinan tertinggi di Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman. Sasaran dari Program KUBE sudah tepat yaitu masyarakat miskin, tetapi terdapat masalah atau kesalahan dalam Program KUBE itu sendiri, yaitu mengenai masalah penentuan jenis usaha program yang tidak sesuai dengan potensi daerah dan minat, kemampuan dari anggota. Program KUBE yang seharusnya bersifat *Bottom-Up* berbanding terbalik dengan kenyataan bahwa program tersebut bersifat *Top-Down*. Masyarakat seharusnya tidak ditempatkan sebagai obyek pembangunan, tetapi sebagai subjek pembangunan dan mereka berhak dan bebas menentukan jenis usaha yang mereka inginkan sesuai dengan konsep *Bottom-Up*. Masyarakat tidak diberikan ruang untuk menyampaikan gagasan dalam pembangunan untuk mengentaskan kemiskinan pada Program KUBE yang dilaksanakan di Desa Caturharjo.

2.) Program KUBE tidak dapat berjalan dengan efektif di Desa Caturharjo dapat dilihat dari Variabel Tepat Tujuan, terutama pada indikator Peningkatan Kemandirian dan Keterampilan. Salahsatu persoalan yang menyebabkan kemandirian belum tercipta pada KUBE Sejahtera Desa Caturharjo adalah mayoritas anggota KUBE tidak memiliki modal pengembangan usaha lagi setelah bantuan yang diturunkan oleh Dinas Sosial Provinsi yang berasal dari dana dekonsentrasi.

3.) Program KUBE Sejahtera tidak dapat berjalan secara efektif juga dapat dilihat pada Variabel Faktor Penghambat Pelaksanaan Program KUBE Sejahtera di Desa Caturharjo yaitu pada Indikator Keadaan masyarakat yang tidak berpartisipasi pada kegiatan pertemuan rutin, Faktor-faktor pendukung produksi yang belum mencukupi, Tingkat pendidikan di pedesaan yang rendah dan Perencanaan pembangunan yang dilaksanakan pemerintah kurang sesuai dengan keahlian masyarakat untuk ikut serta sehingga masyarakat tidak mampu untuk mengikuti kegiatan tersebut.

B. SARAN

Setelah melihat hasil pembahasan yang telah dibahas oleh peneliti, maka peneliti dapat memberikan saran diantaranya adalah :

- 1.) Pemerintah Desa seharusnya memberikan ruang kebebasan bagi keluarga miskin calon anggota Program KUBE, untuk memilih jenis usaha sesuai dengan apa yang mereka inginkan, sesuai dengan tahapan pelaksanaan Program KUBE yang menjelaskan bahwa masyarakat memilih jenis usaha sesuai apa yang mereka inginkan. Tetapi, pada kenyataannya pemilihan jenis usaha kelompok di Desa Caturharjo merupakan pilihan yang dibuat oleh pemerintah desa, yang bergerak pada jenis usaha peternakan. Masyarakat tidak dapat mengembangkan keterampilan dan menciptakan kemandirian dari jenis usaha peternakan.
- 2.) Seharusnya masyarakat yang tergabung dalam Program KUBE memiliki kesadaran untuk berpartisipasi dalam kegiatan KUBE dan memiliki tanggungjawab dan komitmen mereka sebagai anggota KUBE. Salahsatu bentuk kesadaran dalam berpartisipasi adalah dengan turut serta dan hadir dalam kegiatan pertemuan rutin setiap bulan yang diadakan setiap KUBE. Beberapa anggota tidak lagi datang dalam pertemuan rutin yang dilaksanakan setiap bulannya dengan alasan kesibukan mereka masing-masing. Pada setiap pertemuan dibahas mengenai evaluasi dari pelaksanaan KUBE. Mengenai keberhasilan KUBE yang dijalankan, kemudian, membahas mengenai permasalahan-permasalahan yang terjadi di dalam KUBE, yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan Program KUBE, kemudian mencari solusi dalam mengatasi permasalahan tersebut. Evaluasi harus dilakukan secara berkelanjutan. Sesama anggota KUBE mempunyai tanggungjawab untuk keberlangsungan berjalannya Program KUBE, agar KUBE masih tetap berjalan sehingga kesejahteraan mereka akan meningkat.
- 3.) Menjalin hubungan yang harmonis, dan kerjasama yang erat dengan sesama anggota KUBE. Banyak dari anggota KUBE yang keluar dari KUBE karena tidak adanya hubungan kerjasama membawa KUBE menjadi lebih maju.

DAFTAR PUSTAKA**Buku :**

- Chambers, R. (1996). *PRA:Memahami Desa Secara Partisipatif*. Yogyakarta: Kanisius Oxfarm Yayasan Mitra Tani.
- Chaves, R. A. (2015). *Ketimpangan Yang Semakin Lebar*. Jakarta: The World Bank.
- Soemitro. (2002). *Kemiskinan dan Ketidakmerataan di Indonesia*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Soetomo. (2006). *Strategi-Strategi Pembangunan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Suyanto, B. (2013). *Sosiologi Ekonom Kapitalisme dan Konsumsi di Era Masyarakat Post Modernisasi*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Tulung, F. H. (2011). *Program Penanggulangan Kemiskinan Kabinet Indonesia Bersatu II* . Jakarta: KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RI DIREKTORAT JENDERAL INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK.

Berita :

- Nugroho, A. (2017). *Wakili Sleman di Tingkat Nasional, KUBE Sejahtera dan Pendampingnya Raih Juara I*. Jogja: Tribun Jogja.

Jurnal :

- Afrinaldi, M. (2017). Efektivitas program penanganan fakir miskin di kabupaten kampar studi kasus bantuan peningkatan keterampilan di kelurahan sungai pagar. *Jom FISIP, Volume 4(2)*, 1-10.
- Ariyani, N., Fauzi, A., Juanda, B., & Beik, I. S. (2015). (Evaluation of Poverty Alleviation Programs Using The Rappoverty Method), 181-197.
- Dwirandra, A. A. N. B. (2016). ISSN: 2302-8556 E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana KEMISKINAN Ni Ketut Anindya Permatasari 1 Fakultas Ekonomi Universitas Udayana (Unud), Bali , Indonesia ABSTRAK Kemiskinan masih menjadi topik yang penting untuk diteliti . Hal ini tak lepas dari m, 15, 55-81.
- Huraerah, A. (2013). Strategi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial Vol.12, No.1, Juni 2013*.
- Imaduddin, A. (2016). IMPLEMENTASI PROGRAM KELOMPOK USAHA BERSAMA (KUBE) DALAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN BINAAN DINAS SOSIAL WIALAYAH, 4(3), 351-

362.

Juli Panglima Saragih. (2014). Faktor Penyebab dan Kebijakan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Menghapus Kemiskinan. *Jeso*, 6(2), 139–155.

Lubis, H. (2014). Mengentaskan Kemiskinan : Multidimensional Approaches. Retrieved from <http://journal.uny.ac.id/index.php/jppm/article/view/2360>

Miradj, S., & Sumarno, S. (2014). Pemberdayaan Masyarakat Miskin, Melalui Proses Pendidikan Nonformal, Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Di Kabupaten Halmahera Barat. *Jurnal Pendidikan Dan Pemberdayaan Masyarakat*, 1(1), 101. <https://doi.org/10.21831/jppm.v1i1.2360>

Murdiansyah, I. (2014). EVALUASI PROGRAM PENGENTASAN KEMISKINAN BERBASIS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (Studi Kasus Pada Program Gerdu-Taskin di Kabupaten Malang). *Jurnal WIGA*, 4(1), 71–92.

Mutiarin, D., & Khadafi, R. (2017). Efektivitas Program Bantuan Keuangan Khusus Dalam Mengentaskan Kemiskinan di Kabupaten Gunungkidul. *Journal of Governance and Public Policy*, 4(Yogyakarta). Retrieved from <http://journal.umy.ac.id/index.php/GPP/article/view/2993>

Panggulu, Y. T. (2013). EFEKTIVITAS KEBIJAKAN RETRIBUSI PADA DINAS PENGELOLAAN PASAR KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN DI KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD. *Journal Volume II. No. 4. Tahun 2013*, 4.

Pratama, Ci. Y. (2014). Analisis faktor faktor yang mempengaruhi kemiskinan di Indonesia. *Bisnis Dan Manajemen*, 4(September), 210–223.

Prawoto, N. (2009). Memahami Kemiskinan Dan Strategi Penanggulangannya. *Jurnal Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, 9(1), 56–68.

Suliswanto, M. S. W. (2010). Dan Indeks Pembangunan Manusia (Ipm). *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 8, 354–366.

Yasin, H. (2015). Upaya Strategis Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE). *Jurnal Administrasi Publik*, 5(1), 38–41.